
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020

Nurul Ammaliah*, Lina Suherty

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
[*nurulammal22@gmail.com](mailto:nurulammal22@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze whether the variables of Human Development Index (HDI), Minimum Wage and Open Unemployment Rate have a significant effect simultaneously and partially on the number of poor people and to analyze the most dominant variable affecting the number of poor people. The scope of this research takes the area of South Kalimantan Province. The type of data used is secondary data obtained from documentation and literature at agencies related to this research which will be processed by multiple linear regression analysis and simultaneous tests and partial tests. The results of this study are the Human Development Index (HDI), Minimum Wage and Open Unemployment Rate simultaneously and partially have a significant effect on the number of poor people. The Open Unemployment Rate is the most dominant factor affecting the number of poor people.

Keywords: Human Development Index (HDI); Minimum Wage; Open Unemployment Rate; Number of Poor People

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Jumlah Penduduk Miskin dan Untuk menganalisis Variabel yang paling dominan mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin. Ruang lingkup penelitian ini mengambil wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan kepustakaan pada instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan diolah dengan analisa regresi linier berganda dan uji simultan serta uji parsial. Hasil penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Tingkat Pengangguran Terbuka faktor paling dominan mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Upah Minimum; Tingkat Pengangguran Terbuka; Jumlah Penduduk Miskin

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah gejala pada perkembangan yang menyeluruh serta bersangkutan dengan macam-macam hal (Safitri & Effendi, 2019). Besaran masyarakat miskin di Indonesia berfluktuasi, penyusutan terbesar terjadi pada 2009 sebesar 6,96 persen, penyebab penurunan angka kemiskinan adalah pengeluaran perkapita bulanan rumah tangga terendah terus meningkat dan bantuan sosial negara terus meningkat. Kenaikan upah dan harga eceran untuk beberapa bahan pokok dapat membantu pengentasan kemiskinan (Islami & Anis, 2019).

Meningkatnya kemiskinan di Kalimantan Selatan terkait dengan masalah yang mempengaruhi perekonomian nasional dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pembangunan akan tercapai, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengatasi masalah pembangunan dan masyarakat, seperti pengangguran dan lapangan pekerjaan akan berdampak pada kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor kunci untuk

menyaksikan peningkatan pembangunan, terlihat dari pemanfaatan modal yang digunakan untuk membuat lapangan pekerjaan yang memuaskan bagi mereka yang belum bekerja (Fatimah & Sa'roni, 2020). Dengan meningkatnya perkembangan perekonomian maka akan meningkatkan output barang serta jasa agar pekerja meningkatkan komoditas & pelayanan sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Pertiwi & Setyowati, 2022).

Kemiskinan merupakan sebuah keadaan seseorang belum mampu mewujudkan keperluan dasar berupa gizi, sandang/pakaian, papan, pendidikan dan kesehatan (Fajriansyah & Chandriyanti, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpendapat bahwa suatu wilayah/daerah mempunyai harapan untuk mencapai hasil ekspansi melalui hak mereka atas pendidikan, penghasilan dan kesehatan. Bukan hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia juga diperlukan untuk menggolongkan apakah suatu negara/wilayah tergolong dalam tingkatan maju, berkembang atau terbelakang. Ini adalah ukuran dampak kebijakan ekonomi pada suatu negara. Taraf SDM dapat dilihat pada *Quality of Life Index*/indeks pembangunan manusia. Rendahnya IPM akan mengurangi produktivitas tenaga para pekerja suatu populasi. Daya produksi yang tidak sempurna mengakibatkan penghasilan yang lebih rendah, karena pendapatan rendah menciptakan Kemiskinan (Setya Ningrum, 2017). Pembangunan manusia (*human development*) adalah suatu cara untuk meningkatkan kesempatan masyarakat untuk hidup layak. Optimalisasi *human development* memerlukan penanaman dana dilaksanakan dengan wujud APBD sebagai membiayai bagian masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan (Rahimah & Chandriyanti, 2020).

Upah Minimum memiliki arah tujuan yakni menaikkan gaji untuk pekerja. Apabila upah pada mata pencarian turun atau menetap alhasil kesejahteraan akan menurun/konstan sehingga mencemari taraf kemiskinan. Gaji di bayarkan tampaknya dengan nyata harganya relatif carut sedangkan dilihat besaran nilainya relatif besar (Sayyidah & Effendi, 2020).

Tingkat Pengangguran Terbuka disebabkan oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang terlihat lamban & perkembangan tingkatan kerja yang cepat. Tingkat pengangguran yang besar mencerminkan keberhasilan keterbelakangan suatu wilayah akibat kesenjangan antara tingkatan kerja dan besaran lapangan kerja yang ada. Variabel tingkat pengangguran terbuka membuktikan korelasi absolut & berdampak signifikan terhadap kemiskinan. pengaruh negatif pengangguran adalah penurunan penghasilan masyarakat yang pada ujungnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Menurunnya kekayaan masyarakat akibat pengangguran mau tidak mau memperbesar kesempatan dari terjerat pada kemiskinan akibat tanpa memiliki penghasilan (Putra & Arka, 2016).

Topik bahasan permasalahan utama adalah Apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020. Variabel Apakah yang paling dominan mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020. Untuk menganalisis Variabel yang paling dominan mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan bersifat multifaset, artinya karena keinginan masyarakat yang beraneka ragam, serta kemiskinan mempunyai aspek kunci berupa kurangnya substansi, program badan kemasyarakatan, pemahaman & keahlian dengan arah lainnya yaitu kurangnya sumber daya

masyarakat, jaringan, mata pencaharian, dan berita. Aspek kemiskinan ini termanifestasi dalam wujud kurangnya zat makanan, minuman, permukiman yang baik, pemeliharaan kebugaran yang buruk & derajat pembelajaran kurang memadai. Selanjutnya, aspek kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung saling bergantung, artinya keberhasilan/kegagalan dalam bagian dapat mempengaruhi kemajuan atau kegagalan dalam bagian lain & bagian dalam kemiskinan yaitu orang miskin yaitu masyarakat sebagai individu dan bersama-sama (Sukmaraga, 2011). Keadaan yang tidak memadai pada Jumlah Penduduk Miskin mengakibatkan kinerja pergerakan pada aktivitas produksi melemah sehingga terbelakang dibanding penduduk lain yang produktif (Erlina & Surety, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menimbang kinerja *human development* berdasarkan banyak bagian pokok taraf pertumbuhan. Selaku patokan taraf pertumbuhan, Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada program tiga ukuran pokok, termasuk panjang umur & sehat, pengetahuan serta hidup layak. Dari tiga pokok ini saling berkaitan sebab berhubungan dengan banyak faktor, alasan hidup ketika lahir dipakai sebagai pengukur aspek kesehatan (Sopiah & Siregar, 2023). Selain mengukur dimensi pemahaman, juga digunakan penggabungan petunjuk bahasa & lama sekolah. standar kemampuan membeli masyarakat buat beragam keperluan utama dipakai sebagai pengukur ukuran aktivitas hidup yang memadai, hal ini disebabkan oleh pada umumnya biaya per unit populasi menjadi ancangan pendapatan untuk merepresentasikan pelayanan pembangunan guna mendapatkan hidup memadai (Rahimah & Chandriyanti, 2020).

Upah Minimum

Pemerintah di banyak negara mengupayakan dalam perlindungan kelompok yang lemah seperti pekerja (buruh) pada kegiatan usaha mereka dengan para majikan/atasan. Biasanya untuk memangkas pengeluaran barang produksi, pengusaha terpaksa memberikan upah yang sedikit kepada para pekerja. Sebagai perlindungan pada pekerja, maka menentukan melalui UUD suatu besaran upah minimum yang boleh di bayar oleh pengusaha/produsen kepada pekerjanya. Produsen dilarang memberikan upah pekerja terlalu rendah dari pada besaran upah minimum yang di tetapkan. Tingkat upah minimum bagi suatu wilayah dikatakan sebagai besaran Upah Minimum Regional (UMR), tentu saja setiap wilayah/daerah berbeda dengan wilayah yang satu dan wilayah yang lainnya (Suparmoko, 1998).

Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT ialah masyarakat produktif yang berumur 15 hingga 64 tahun yang sedang mencari penghasilan. Jika memiliki pekerjaan, disebut pekerja, jika tidak memiliki pekerjaan, maka disebut orang yang menganggur. Tingkat pengangguran diukur sebagai rasio dari tingkatan kerja yang menganggur hingga seluruh angkatan kerja. Pengangguran yaitu seseorang yang tidak bekerja tapi sedang giat melacak pekerjaan, tidak bisa dikelompokkan menjadi TPT. Pengangguran masuk dalam situasi penduduk yang bekerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tapi tidak memilikinya (Prabowo Dwi Kristanto, 2014).

Penelitian Terdahulu

Saragih dkk (2022) berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021 menunjukkan hasil Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2007 – 2021.

Ayu (2018) berjudul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 menunjukkan hasil Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap penduduk miskin dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin.

Sundari (2018) berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum (UM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2017 menunjukkan hasil tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, Variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan variabel upah minimum tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung 2011-2017.

Rahmawati dkk (2022) berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 menunjukkan hasil secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin, Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin dan secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

Anggie Citra Prastikasari (2022) berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kesempatan Kerja, Jumlah Penduduk Miskin, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Eks Karesidenan Semarang Periode 2017-2021 menunjukkan hasil Dari hasil yang diperoleh dari uji F menyatakan indeks pembangunan manusia, tingkat kesempatan kerja, jumlah penduduk miskin, dan upah minimum dengan bersamaan memiliki pengaruh pada tingkat pengangguran terbuka, hasil yang diperoleh dari uji t, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, dan upah minimum memiliki pengaruh positif pada tingkat pengangguran terbuka. Namun, jumlah penduduk miskin mempengaruhi secara negatif pada tingkat pengangguran terbuka di Eks Karesidenan Semarang dalam jangka 2017-2021.

METODE

Penelitian dilaksanakan agar melihat variabel apakah yang berpengaruh pada JPM di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020, dengan sendiri atau bersama-sama. Penelitian ini meliputi Pengaruh IPM, Upah Minimum dan TPT terhadap JPM. Jenis penelitian yang digunakan berupa metode kuantitatif. Pengaruh dari variabel apa saja yang mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020. Data yang dipakai adalah data deret waktu (*time series*). Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai pelengkap data yang telah disiapkan yang berupa pengarsipan, publikasi, catatan, dokumen dan informasi dengan menyalin informasi dari tempat dan literatur yang relevan. Serta literatur yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, buku dan majalah, baik melalui website yang relevan.

Teknik Analisis Data

Dengan Uji asumsi regresi klasik yaitu ketentuan statistik yang wajib dilengkapi pada analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, untuk memastikan bahwa model terbaik untuk akurasi estimasi, tidak bias dan konsisten yang tujuannya sebagai memeriksa sesuatu hasil yang dipakai pada penelitian terbebas masalah atau persebarannya normal. Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel IPM (X1), Upah Minimum (X2) dan TPT (X3) terhadap JPM di Provinsi Kalsel, yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y : Jumlah Penduduk Miskin (satuan jiwa)
a : Konstanta
X1 : Indeks Pembangunan Manusia
X2 : Upah Minimum (satuan rupiah)
X3 : Tingkat Pengangguran Terbuka (satuan persen)
 β : Koefisien Regresi
 ε : Standar Error

HASIL DAN ANALISIS

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kalsel kaya akan keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut menggambarkan daya pikat tersendiri bagi masyarakat adat dan wisatawan yang membuka potensi daerah serta mengembangkan kemakmuran warga pulau Kalimantan Selatan. Dengan dilakukannya pengembangan wilayah, maka luas wilayah Provinsi Kalsel saat ini secara administratif adalah 37.280,39 km² dan terbelah penuh menjadi 13 kabupaten dan kota administratif ditambah informasi 152 kecamatan dan 2.008 desa/kelurahan (Fajriansyah & Chandriyanti, 2022).

Secara astronomis, Provinsi Kalsel berada pada 114 19' 13" sampai 116 33' 28" BT dan 1 21' 49" hingga 4 10' 14" LS. Menurut geografis Provinsi ini berada pada bagian selatan Pulau Kalimantan pada keadaan sebagai berikut:

Pertama, Provinsi Kalteng di bagian barat, kedua Selat Makassar di bagian timur, ketiga Laut Jawa di bagian selatan, dan keempat Provinsi Kalteng di bagian utara.

Tabel 1

Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/kota	Ibu kota	Luas Wilayah Km	Jumlah Penduduk
1	Kab. Balangan	Paringin	1.878,30	130.355
2	Kab. Banjar	Martapura	4.668,00	565.635
3	Kab. Bario Kuala	Barabahan	2.996,46	313.021
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kandangan	1.804,94	228.006
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Barabai	1.472,00	258.721
6	Kab. Hulu Sungai Utara	Amuntai	892,70	226.727
7	Kab. Kotabaru	Kotabaru	9.482,73	325.622
8	Kab. Tabalong	Tanjung	3.766,97	253.305
9	Kab. Tanah Bumbu	Batulicin	5.006,96	322.646
10	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	3.631,35	348.966
11	Kab. Tapin	Rantau	2.700,82	189.475
12	Kota Banjarbaru	-	371,38	253.442
13	Kota Banjarmasin	-	72,00	657.663

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023, Diolah Kembali

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Banjarbaru ibu kota Kalimantan Selatan memiliki luas 371,38 km² dan persentase luas provinsi sebesar 0,96 persen dan Banjarbaru ibu kotanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 253.442 jiwa. Data Provinsi Kalsel tentang luas dan jumlah pulau disajikan berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2019 dan data Kemendagri 2018.

**Karakteristik Deskripsi Variabel
Jumlah Penduduk Miskin (Y)**

Tabel 2

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020		
No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
1	2010	181.963
2	2011	195.523
3	2012	190.694
4	2013	183.070
5	2014	182.876
6	2015	198.436
7	2016	195.700
8	2017	193.919
9	2018	189.033
10	2019	192.480
11	2020	187.874

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020, Diolah Kembali

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bawah fluktuasi Jumlah Penduduk Miskin sebelas tahun terakhir dari tahun 2010 kemiskinan mencapai nilai 181.963 jiwa dan terjadi peningkatan di tahun 2011 yaitu sebesar 195.523 jiwa, setelah itu kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 182.876 jiwa, sampai pada tahun 2015 meningkat hingga mencapai 198.436 jiwa, terakhir pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali di angka 187.874 jiwa. Pada hal ini, Memang masalah kemiskinan harus disikapi dengan melihat faktor penyebab apa saja yang dominan berkontribusi terhadap masalah tersebut sehingga menjadi fokus utama dalam mengurangi JPM di Indonesia terutama di Provinsi Kalsel. Pada uraian di atas diketahui bahwa Indonesia, khususnya di Provinsi Kalsel bukan hanya IPM yang menjadi penyebab utama kemiskinan di negara/daerah tersebut, tetapi juga terdapat kendala lain yaitu UM dan TPT yang menjadi musuh besar Kemiskinan di Provinsi Kalsel.

IPM (X1)

Tabel 3

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020		
No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	2010	65,20
2	2011	65,89
3	2012	66,68
4	2013	67,63
5	2014	67,63
6	2015	68,38
7	2016	69,05
8	2017	69,65
9	2018	70,17
10	2019	70,72
11	2020	70,91

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diolah Kembali

Pada tabel 3 memperlihatkan bahwa IPM di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat setiap tahunnya, IPM pada tahun 2020 sebesar 70,91 persen. Artinya, IPM di Provinsi Kalsel naik cukup baik antara tahun 2010 hingga 2020.

Upah Minimum (X2)

Tabel 4
Upah Minimum di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020

No	Tahun	Upah Minimum (Rupiah)
1	2010	1024500
2	2011	1126000
3	2012	1225000
4	2013	1337500
5	2014	1620000
6	2015	1870000
7	2016	2085050
8	2017	2258000
9	2018	2454671
10	2019	2651781
11	2020	2877448

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diolah Kembali

Data yang dipakai pada penelitian ini berupa upah minimum di provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 4 di atas ini memperlihatkan bahwasanya upah minimum mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2020. Upah Minimum terendah pada tahun 2010 senilai Rp. 1.024.500 dan tertinggi pada tahun 2020 senilai Rp 2.877.448. Artinya, upah minimum telah meningkat secara signifikan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (X3)

Tabel 5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020

No	Tahun	TPT (persen)
1	2010	5,25
2	2011	6,15
3	2012	5,14
4	2013	3,66
5	2014	3,80
6	2015	4,92
7	2016	5,45
8	2017	4,77
9	2018	4,35
10	2019	4,18
11	2020	4,74

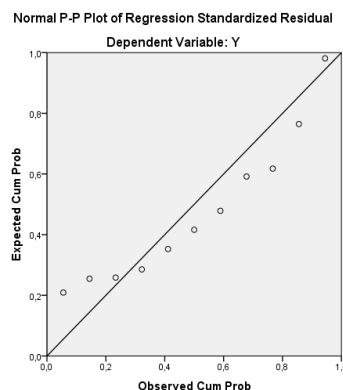
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diolah Kembali

Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa perkembangan TPT puncaknya pada tahun 2011 sebesar 6,15 persen dan terendah pada tahun 2013 sebesar 3,66 persen dan ditahun 2020 menjadi 4,74 persen. Artinya, TPT di Provinsi Kalimantan Selatan berfluktuasi dari tahun 2010 hingga 2020.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Arah dari uji normalitas yaitu agar melihat bagaimana data tersebut pakai normal/tidak (Rahimah & Chandriyanti, 2020).



Gambar 1. Hasil uji Normalitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Pada Uji normalitas menunjukkan bahwasanya dot menebar & mengiringi baris diagonal, maka bisa disimpulkan sesungguhnya data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan bahwa kolom VIF, besar VIF sebagai variabel IPM X1 dan Upah Minimum X2 lebih dari 10, sehingga bisa dijelaskan bahwa mengalami multikolinearitas. pada tingkat pengangguran terbuka X3 tidak terjadi karena angka *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi model regresi linier yang bagus ialah model tanpa multikolinearitas. Jadi kesimpulannya yaitu model X1 dan X2 tidak bebas dari multikolinearitas, sedangkan X3 bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 6

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	0,018	54,647
X2	0,019	52,004
X3	0,704	1,420

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Uji Autokorelasi

Memperlihatkan bahwa tidak adanya autokorelasi berupa bukti yaitu nilai DW sebesar 2,406. Status autokorelasi jika $dU < d < 4-vi$ Berdasarkan keterangan di atas, angka dU adalah 1,9280 dan nilai 4-dU sebesar 2,072 sehingga $1,9280 < 2,406 < 2,072$.

Tabel 7

**Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,891 ^a	0,794	0,705	3095,04287	2,406

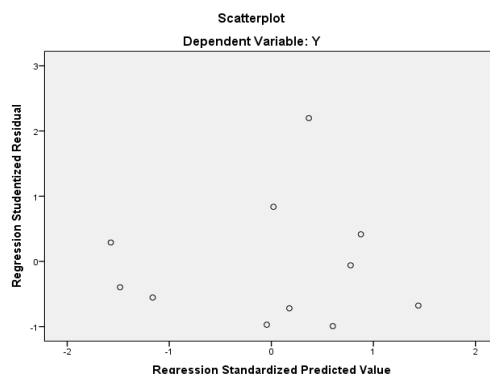
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Pada tabel 7 Durbin Watson diberi peringkat 2,406. kondisi tidak terjadi *Autokorelasi* yakni $dU < d < 4-vi$ sampel 11 tahun (*time series*) dan tiga variabel bebas, angka dU adalah 1,9280 dan 4-dU adalah 2,072, jadi $1,9280 < 2,406 < 2,072$. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada *autokorelasi*.

Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan agar mengetahui apakah terdapat deviasi dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Varian pada residual seluruh titik dalam model regresi. Ketentuan model

regresi yaitu tanpa adanya indikasi heteroskedastisitas, misalnya melihat dispersi. Jika nilai tidak terdistribusi secara merata, alhasil tidak adanya heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan dari hasil di bawah ini bahwa titik-titik berdistribusi tidak teratur (acak) dan tidak berpola di atas garis dasar X dan garis dasar Y, sehingga tidak terbukti adanya heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	B	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	-598642,886	236079,782	-2,536	0,039		
1 X1	11844,271	3695,903	3,205	0,015	0,018	54,647
X2	-0,030	0,011	-2,795	0,027	0,019	52,004
X3	7660,076	1579,197	4,851	0,002	0,704	1,420

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

$$Y = -598642,886 + 11844,271X1 - 0,030X2 + 7660,076X3$$

Konstanta. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh untuk variabel konstanta (C) berpengaruh negatif sebesar $\beta_0 = -598642,886$, yang mengartikan apabila IPM (X1), Upah Minimum (X2), dan TPT (X3) nilainya sama dengan 0 atau dalam kata lain tidak ada perubahan, maka Jumlah Penduduk Miskin (Y) menunjukkan nilai sebesar -598642,886. IPM (X1). Dengan koefisien sebesar 11,844 membuktikan jika IPM (X1) meningkat senilai 1%, maka JPM di Provinsi Kalimantan Selatan (Y) akan menurun sebanyak 11,8411844,2714%. Sebaliknya dengan penurunan 1%, jadi JPM di Provinsi Kalsel akan meningkat sebanyak 11844,271.

Upah Minimum (X2). Dengan koefisien -0,030, artinya setiap kenaikan 1 rupiah upah minimum (X2) jadi JPM di Provinsi Kalsel (Y) menurun senilai -0,030. Sebaliknya jika Upah Minimum (X2) turun senilai 1 rupiah, maka JPM di Provinsi Kalsel (Y) bertambah senilai -0,030. Tingkat Pengangguran Terbuka (X3). Dengan faktor 7660,076 artinya jika TPT (X3) meningkat senilai 1%, lalu JPM di Provinsi Kalsel (Y) juga meningkat sebesar 7660,076 atau 7,66%. Sebaliknya, bila TPT (X3) turun senilai 1%, maka JPM di Provinsi Kalsel (Y) turun senilai 7660,076.

Dari hasil regresi di atas menunjukkan Koefisien determinasi untuk menginformasikan baik atau tidaknya variabel, dengan nilai koefisien mendekati 1 alhasil akan bertambah baik variabel sedangkan apabila angka mendekati 0 mengasumsikan bahwa variabel tersebut tidak bisa menerangkan variabel terikat. kesimpulan pengolahan data di atas menunjukkan bahwa R-squared senilai 0,794 (79,4%), ini berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat senilai 79,4%. Sisanya senilai 20,6% dari variabel yang tidak dibahas.

Uji F. Guna melihat secara simultan seberapa banyak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Diperoleh angka sig $0,009 < 0,05$ artinya tiap-tiap variabel bebas dengan bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian ini IPM, Upah Minimum dan TPT berpengaruh signifikan terhadap JPM. Pengujian Parsial (T). diperlukan buat membuktikan sebanyak apa pengaruh variabel independen menjelaskan variabel dependen yang digunakan dengan cara perbandingan angka t-hitung tiap-tiap variabel independen terhadap angka t-tabel dengan alpha 0,05 atau 0,05%. Jika nilai T-hitung $>$ T-tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan kepada variabel dependen.

Pengaruh IPM terhadap JPM di Provinsi Kalsel. IPM (X1) memperoleh nilai sig sebesar 0,015. Nilai tersebut kurang dari taraf nyata atau alpha ($0,015 < 0,05$) dan memperlihatkan variabel IPM (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap JPM (Y) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020. Pengaruh Upah Minimum terhadap JPM di Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel Upah Minimum (X2) memperoleh nilai sig senilai 0,027. Nilai tersebut kurang dari taraf nyata atau alpha ($0,027 < 0,05$) dan menunjukkan variabel Upah Minimum (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap JPM di Provinsi Kalsel. variabel TPT (X3) menghasilkan nilai sig sebesar 0,002. angka tersebut kurang dari taraf nyata atau alpha ($0,002 < 0,05$) yang memperlihatkan TPT (X3) berpengaruh signifikan secara parsial dengan variabel JPM. Variabel paling Dominan Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin dilihat dari tabel Coefficients besaran nilai signifikansi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X1 nilai sig kurang dari alpha ($0,015 < 0,05$), Upah Minimum X2 berupa angka sig kurang dari alpha ($0,027 < 0,05$) dan TPT X3 dengan nilai sig kurang dari alpha ($0,002 < 0,05$). Berdasarkan nilai signifikansi jadi dapat dilihat dari ketiga variabel independen tersebut yang paling menjauhi nol adalah variabel TPT X3 yaitu sebesar $0,002 < 0,05$.

PENUTUP

Kesimpulan

Dijelaskan secara simultan variabel IPM, Upah Minimum dan TPT memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel JPM. Secara parsial variabel IPM, Upah Minimum dan TPT berpengaruh signifikan terhadap JPM di Provinsi Kalsel Tahun 2010-2020. Faktor yang paling dominan mempengaruhi JPM di Provinsi Kalsel selama tahun 2010-2020 adalah variabel TPT.

Saran

Saran yang dikemukakan adalah Pemerintahan harus berusaha untuk memperbaiki taraf pembelajaran dan kesehatan melalui program-program kesehatan sosial, dan masyarakat harus berusaha untuk menggunakan program-program tersebut dengan cara yang meningkatkan skor Indeks Pembangunan Manusia supaya akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan perhatian pada upah minimum yang berlaku dan idealnya upah minimum harus memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Pemerintah diminta bisa menciptakan lingkungan kerja untuk warga dan melaksanakan strategi untuk membina masyarakat agar menjadi pengusaha otonom sehingga bisa memperbaiki dari kemiskinan tanggungan dan menciptakan lingkungan kerja untuk warga sekeliling. Pembaca diharapkan dapat menyumbangkan penelitian ini ke dalam literatur, sebagai data tambahan yang berguna untuk pembaca agar bisa menyumbangkan ide buat mereka yang menghadapi masalah serupa/mau melaksanakan penelitian lebih dalam. Untuk peneliti berikutnya, penentuan tempat, variabel, alat analisis & waktu penelitian disarankan berlainan dari penelitian yang sudah ada supaya memperlihatkan suasana sebenarnya.

BIBLIOGRAPHY

Anggie Citra Prastikasari, M. I. H. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia,

- Tingkat Kesempatan Kerja, Jumlah Penduduk Miskin, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Eks Karesidenan Semarang Periode 2017-2021. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2).
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–15.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020*. Diakses Pada 20 Februari 2023.
- Erlina, & Surety, L. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin Dan pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Banjarbaru. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 852–862.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v2i4.1219>
- Fajriansyah, S., & Chandriyanti, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 558–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6957>
- Fatimah, S., & Sa'roni, C. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Tanah Laut. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 585–599.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v3i2.2558>
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Mathematics, A. (2016). Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan*, 1–23.
- Pertiwi, M. U., & Setyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Upah Minimum, Terhadap Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2017- 2021. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 66–72.
- Prabowo Dwi Kristanto. (2014). *Ekonomi , Upah Minimum , dan Tingkat Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012*.
- Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(3), 416–444.
- Rahimah, & Chandriyanti, I. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dan Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 804–818. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7029>
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 19–31. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23358>
- Safitri, L., & Effendi, M. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 842–851. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v2i4.1217>
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

-
- Tahun 2007–2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 71–79.
- Sayyidah, & Effendi, M. (2020). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 373–389.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v3i2.2541>
- Setya Ningrum, S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192.
- Sopiah, S., & Siregar, S. (2023). Peranan Belanja Pendidikan, Kesehatan Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM Di Kabupaten Tanah Laut. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 260–268.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v6i1.8978>
- Sukmaraga, P. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. *Harvard Business Review*, 85(3), 21–22.
- Sundari, I. (2018). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Upah Minimum (UM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2017). *Skripsi*, 1–164.
- Suparmoko, M. (1998). *Pengantar Ekonomi Makro* (4th ed.).